



**ANALISIS YURIDIS PEMERINTAHAN OTORITA DAN DAERAH
KHUSUS IBU KOTA DI INDONESIA**

**(Studi Perbandingan Peraturan Antara Undang-Undang No. 3 Tahun 2022
Tentang Ibu Kota Negara, Keppres Republik Indonesia No. 41 Tahun 1973
Tentang Daerah Industri Pulau Batam Dan Undang-Undang No. 29 Tahun
2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia)**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (SI) Ilmu Hukum**

Oleh

MUHAMMAD ALIF SYAFIQ

NIM 11000120140548

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024



**ANALISIS YURIDIS PEMERINTAHAN OTORITA DAN DAERAH
KHUSUS IBU KOTA DI INDONESIA**

**(Studi Perbandingan Peraturan Antara Undang-Undang No. 3 Tahun 2022
Tentang Ibu Kota Negara, Keppres Republik Indonesia No. 41 Tahun 1973
Tentang Daerah Industri Pulau Batam Dan Undang-Undang No. 29 Tahun
2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia)**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (SI) Ilmu Hukum**

Oleh

MUHAMMAD ALIF SYAFIQ

NIM 11000120140548

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PEMERINTAHAN OTORITA DAN DAERAH
KHUSUS IBU KOTA DI INDONESIA**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD ALIF SYAFIQ

NIM 11000120140548

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Indarja, S.H., M.H.

NIP 196203221987031003

Pembimbing II



Prof. Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M. Hum.

NIP 196009261986032001

HALAMAN PENGUJIAN
ANALISIS YURIDIS PEMERINTAHAN OTORITA DAN DAERAH
KHUSUS IBU KOTA DI INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun oleh

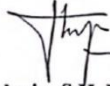
MUHAMMAD ALIF SYAFIQ

11000120140548

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Dewan Penguji

Ketua



Indarja, S.H. M.H.

NIP 16203221987031003

Anggota Penguji I



Prof. Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M. Hum
NIP 196009261986032001

Anggota Penguji II



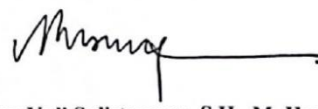
Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H.
NIP 198905212014042001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M. Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistawan, S.H., M. Hum.
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 Februari 2024



MUHAMMAD ALIF SYAFIQ

NIM 11000120140548

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Politae Legius Non Leges Politii Adoptante

“Politik Harus Tunduk Pada Hukum, Bukan Sebaliknya.”

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk:

Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Ayah dan Ibunda tersayang

Teman-teman Terbaik Penulis

Nusa, Bangsa, dan Almamater tercinta

ABSTRAK

Ibu Kota Negara memiliki peran krusial dalam menjalankan segala urusan administratif terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Badan Otorita yang disebut Otorita Ibu Kota Nusantara akan mengawasi proses ini. Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, Otorita telah dikenal sebelumnya. Penelitian ini bertujuan membandingkan Otorita IKN, Otorita Batam, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal posisi, wewenang, tugas, tujuan, serta implementasi kebijakan mereka.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif yang didukung oleh data sekunder, termasuk bahan hukum primer seperti UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, serta berbagai jurnal dan literatur hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otorita IKN, Otorita Batam, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki perbedaan signifikan dalam hal posisi, tugas, fungsi, wewenang, dan peran sebagai pemimpin daerah. Ini disebabkan oleh fokus utama masing-masing entitas; Otorita IKN berfokus pada pembangunan infrastruktur di Ibu Kota yang baru, Otorita Batam berfokus pada penguatan ekonomi di Batam, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berfokus pada peran sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan di Indonesia. Perbedaan ini juga tercermin dalam implementasi kebijakan mereka, di mana Otorita IKN lebih memfokuskan pada transisi dan pembangunan infrastruktur baru untuk mendukung pemindahan ibu kota ke lokasi baru, sementara Otorita Batam lebih menekankan pertumbuhan ekonomi melalui insentif investasi, peningkatan infrastruktur, dan perbaikan prosedur bisnis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan kompleks terkait dengan masalah kota besar dan berusaha meningkatkan layanan publik, infrastruktur transportasi, serta kualitas hidup penduduknya.

Dengan demikian, masing-masing entitas berusaha mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan khusus wilayah yang mereka kelola, dengan fokus yang berbeda-beda.

Kata kunci: Ibu Kota Negara, Otorita, Pemerintahan Daerah

ABSTRACT

The State Capital has a crucial role in carrying out all administrative matters related to the relocation of the new State Capital in accordance with Law Number 3 of 2022 on the State Capital. An Authority Body called the Nusantara Capital Authority or Authority IKN will oversee this process. In the context of Indonesia's constitutional system, the Authority has been recognized before. This research aims to compare Authority IKN, Authority Batam, and the Provincial Government of DKI Jakarta in terms of their position, authority, duties, objectives, and policy implementation.

The research method used is a normative juridical approach with descriptive analysis supported by secondary data, including primary legal materials such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 3 of 2022 on IKN, Law No. 23 of 2004 on Regional Government, Law No. 29 of 2007 on the Provincial Government of DKI Jakarta, and Presidential Decree No. 41 of 1973 on the Batam Island Industrial Area, as well as various journals and legal literature.

The results show that the Authority IKN, Authority Batam, and DKI Jakarta Provincial Government have significant differences in terms of their positions, duties, functions, authorities, and roles as regional leaders. This is due to the main focus of each entity; Authority IKN focuses on infrastructure development in the new capital city, Authority Batam focuses on strengthening the economy in Batam, and the DKI Jakarta Provincial Government focuses on its role as the centre of government, economy, and culture in Indonesia. These differences are also reflected in their policy implementation, with the Authority IKN focusing more on transition and new infrastructure development to support the relocation of the capital city to its new location, while the Authority Batam emphasizes economic growth through investment incentives, infrastructure improvements, and improved business procedures. The Provincial Government of DKI Jakarta faces complex challenges related to big city issues and seeks to improve public services, transportation infrastructure and the quality of life of its residents.

As such, each entity tries to implement policies according to the specific needs of the areas they manage, with different focuses.

Keyword: Authority, Capital City, Regional Government

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan berkat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PEMERINTAHAN OTORITA DAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA DI INDONESIA”**. Adapun maksud dan tujuan penulisan hukum ini guna menyelesaikan studi Program Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini banyak mendapatkan dukungan dan bantuan, baik secara moral, finansial, dan juga pengetahuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulis dan menjadikan skripsi/penulisan hukum ini ada, yakni:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M. Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Indarja, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing I yang sudah memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
4. Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, S.H. M. Hum., selaku dosen Pembimbing II yang sudah memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
5. Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H., selaku dosen penguji, terima kasih atas kritik, saran, serta kepedulian yang telah diberikan kepada penulis selama proses pengujian penulisan hukum ini;

6. Ibu Dr. Amalia Diamantina, S.H., M. Hum., selaku selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan semangatnya untuk membagikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu dalam memberikan pelayanan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Kedua orang tua yang penulis hormati dan sayangi, ayah dr. M. Taufiq, Sp, THT-KL dan bunda Lilia Lusana Utari SKM, MARS. yang sudah memberikan bantuan dan dukungan terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
10. Saudara penulis, Aqilla Lutfiah, S.ked. dan Muhammad Adib Ichwan yang turut menjadikan semangat bagi penulis dalam menjalani proses pembuatan penulisan hukum ini;
11. Keluarga besar Bapak Babul Khoir Harahap, S.H., M.H. yang telah banyak berjasa memberikan banyak masukan yang sangat berarti bagi penulis dalam menjalani proses pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
12. Sahabat penulis di Graha Estetika, Rykho Rizki Babul Khoir Harahap, Kevin Harahap, Franzesca Ofelia, Khanza, Fachry Hafidi, Bilal Baihaqi yang selalu menemani kegiatan penulis sehari-hari dan selalu ada dalam senang maupun duka selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
13. Sahabat-sahabat Tersayang penulis sewaktu kuliah, Raihan Daffi Nauli Siregar, Gerry Norris, Rifqi Syafiq, Risang Bayu, Fariz Syahputra, Delvian Hafizh, Ghiffary dan masih banyak lagi, yang telah mau berteman dekat dengan penulis dan penulis repotkan selama berteman;

14. Teman-teman UKM-F *Asian Law Student Association (ALSA)* tahun 2022, khususnya seluruh teman-teman *Alumni Relation Division* ARD yang sudah memberikan banyak pengalaman bagi penulis di organisasi kebanggaan bersama, Gema Keadilan;
15. Keluarga besar Gobs, Ridho Anbiya, Bilal Baihaqi, Oka Nadhil Auzan, Fachry Hafidi, Agung, Raihan Daffi, Rifqi Syafiq yang telah memberikan dukungan moril dan materil selama penulis berada di Universitas Diponegoro;
16. Keluarga Besar Hutan Timur, Bagoes Priansyah, Rafi Yurrazak, Faiz Aqsa, Gardi Kancanah, Naufal Arrazi, Akram Muzaki, Teuku Ryas, Fahri Akbar, Fadel Nanda, Ibnu Almuafi, Arya Pulungan yang juga telah menemani saya sebagai tempat melepas penat dan canda tawa walaupun menghambat proses penulisan saya;
17. Kakak-kakak tingkat, Ryka Harahap Rizqvio, Hafidh, Tita Nadira dan masih banyak lagi yang sudah mau membagikan pengalamannya kepada penulis; dan
18. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro lainnya yang telah memberikan dukungan dan kenangan serta pelajaran bagi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna sebagai hasil karya tulis ilmiah yang komprehensif. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis menerima adanya kritik ataupun saran agar lebih baik lagi. Penulis berharap bahwa penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkan.

Semarang, 19 Februari 2024

Penulis

MUHAMMAD ALIF SYAFIQ

NIM 11000120140548

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Mengenai Otonomi Daerah	26
1. Sejarah Otonomi Daerah	26
2. Pengertian Otonomi Daerah	32
3. Tujuan Otonomi Daerah.....	34
4. Asas Otonomi Daerah	35
B. Tinjauan Mengenai Teori Negara Kesatuan	36
C. Tinjauan Mengenai Otorita.....	41
D. Tinjauan Mengenai Ibu Kota Negara	42

1.	Pengertian Ibu Kota Negara	42
2.	Peran Ibu Kota Negara	44
3.	Fungsi Ibu Kota Negara.....	46
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A.	Perbandingan Tujuan, Tugas dan Kewenangan Antara Otorita Ibu Kota Nusantara, Otorita Batam, dan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Istimewa Jakarta dalam Mengelola dan Mengatur Wilayahnya..	51
1.	Perbandingan Tugas Otorita IKN, Otorita Batam dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	57
2.	Perbandingan kewenangan antara Otorita IKN, Otorita Batam dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.....	67
B.	Perbandingan Pengaturan Kebijakan Antara Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Otorita Batam dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dalam Memenuhi Kebutuhan Wilayahnya.....	79
BAB IV	112
PENUTUP	112
A.	KESIMPULAN.....	112
B.	SARAN.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116